ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 SERI C TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

(Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi)

Peraturan Daerah Nomor 27 Seri C Tahun 2003 tentang SIUP menjabarkan tentang kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dagang untuk memiliki surat izin usaha dagang agar terlindungnya usaha dagang yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur, dan terbuka. Selain itu pembuatan SIUP ditujukan untuk membina dunia UMKM. Mahalnya biayanya pembuatan IMB menjadi faktor penghambat pembuatan SIUP oleh kerena itu Pemerintah Kota Cimahi menggratiskan perizinan SIUP. Kendala setelah digratiskan SIUP adalah ketidaktahuan masyarakat tentang kebijakan pemerintah tersebut.

Teori yang digunakan adalah teori yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan peraturan daerah yang dikemukan oleh Edward III dalam bukunya *Implementing Public Polic.* Edward III mengatakan indikator yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan, meliputi *Communication*, *Resourcrces, Dispositions,* dan *Bureacratic Structure*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti dalam menentukan informan menggunakan teknik *Sampling Purposive* yang terdiri dari 4 aparatur KPPT Kota Cimahi dan 5 pelaku UMKM yang belum mempunyai SIUP dan 4 pelaku UMKM yang telah mempunyai SIUP dikarenakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, *Communication* Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM**)** berjalan belum cukup efektif dilihat dari kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMKM. *Resources* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi berjalan kurang baik dilihat dari minimnya jumlah aparatur dan pemanfaatan sarana yang tidak maksimal. *Dispositions* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi berjalan dengan baik dilihat dari terlaksananya kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan *Bureaucratic Structure* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi berjalan dengan baik dilihat dari aparatur yang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam SOP.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SIUP, UMKM.